

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**

**Miranda Dewi<sup>1\*</sup>, Ayunda Purti Nilasari<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Tidar

E-mail: <sup>1)</sup> [m1radad3w1@gmail.com](mailto:m1radad3w1@gmail.com), <sup>2)</sup> [ayundaputri@untidar.ac.id](mailto:ayundaputri@untidar.ac.id)

***Abstract***

*This study aims to analyze the financial statements of the local government of Wonosobo Regency. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of the ratio analysis using the Wonosobo Regency report data that have been described previously, it can be concluded that the conclusion of the Wonosobo Regency government's financial performance in 2018-2019 if seen from the regional financial independence ratio can still be categorized as very low. In addition, the financial performance of the Wonosobo Regency government in 2018-2019 when viewed based on the effectiveness ratio is categorized as very effective. Meanwhile, in the analysis of the operational expenditure compatibility ratio data in 2017-2018 it can be said that the Wonosobo Regency government has a tendency to use its budget for operational expenditure.*

**Keywords:** Budget, Operational Expenditure, Financial Report, Financial Performance, Local Government

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten wonosobo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari analisis rasio dengan menggunakan data laporan keuangan Kabupaten Wonosobo yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018-2019 jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerahnya masih dapat dikategorikan rendah sekali. Selain itu kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018-2019 jika dilihat berdasarkan rasio efektifitasnya dikategorikan sangat efektif. Dan pada data analisis rasio keserasian belanja operasional pada tahun 2017-2018 dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Wonosobo memiliki kecenderungan menggunakan anggarannya untuk belanja operasional.

**Kata kunci:** Anggaran, Belanja Operasional, Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan, Pemerintah Daerah

**PENDAHULUAN**

Analisis laporan keuangan merupakan salah satu media atau cara yang dimaksudkan untuk melihat dan menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya. Di mana analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil dari analisis

---

<sup>1</sup>Universitas Tidar

Miranda Dewi

\*E-mail: [m1radad3w1@gmail.com](mailto:m1radad3w1@gmail.com)

tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik (Mahmudi, 2016). Setiap Pemerintah daerah baik itu yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya secara berkala. Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun sesuai aturan yang berlaku untuk dinilai apakah berhasil atau tidak dalam menjalankan tugasnya analisis laporan keuangan ini berfokus pada laporan keuangan yang memanfaatkan sebuah teknik analisis untuk mengetahui dan memahami isu serta peluang yang ada sehingga akan sangat bermanfaat dalam upaya pengambilan suatu keputusan.

Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor-sektor strategis dan potensial pada wilayah tersebut baik sektor riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan juga sangat penting dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik yang berkualitas. Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (PP 58 tahun 2005, pasal 4).

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Rosmawati & Kartikasari, 2020). Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan analisis rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan (Halim, 2013).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Pengelolaan keuangan daerah perlu diperhatikan penggunaannya. Menurut (Mahsun, 2006) Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya. Meskipun demikian,

dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Abdul Halim 2012:4 dalam (Saraswati, 2019)).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya (Jasasila, 2017; Pramono, 2014).

Dalam rangka menjaga kualitas dan kredibilitas sebuah laporan keuangan, maka kegiatan analisis ini membutuhkan teknik atau cara tertentu yang tepat supaya kegiatan analisis ini dapat berguna bagi para pemangku kebijakan dan pengambil keputusan (Alhajjriana et al., 2017; Ningtyas & Widyawati, 2015). Ada beberapa teknik analisis untuk menganalisis laporan keuangan, yaitu diantaranya analisis varians, analisis rasio, analisis pertumbuhan, analisis regresi, dan analisis prediksi. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah melakukan perhitungan menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan sendiri adalah merupakan perbandingan antara dua angka atau lebih yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun (Mahmudi, 2016), diantaranya yaitu:

1) Analisis Rasio Kemandirian

Kemandirian suatu keuangan daerah mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam mengelola dan mengurus sendiri program, kegiatan, serta pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari jumlah pendapatan asli daerahnya (PAD), juga yang berkaitan dengan sumber-sumber lainnya seperti bantuan atau pinjaman dari pemerintah di tingkat pusat (Halim, 2007 dalam Satria & Munandar (2017)).

Cara menghitung suatu perbandingan kemandirian keuangan daerah yaitu dengan melakukan pembagian jumlah pendapatan asli daerah (PAD) dengan jumlah pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah (Farida & Nugraha,

2019; Nurchayati, 2021). Semakin tinggi jumlah perbandingan maka semakin memperlihatkan bahwa daerah tersebut memiliki pengelolaan keuangan yang mandiri (Mahmudi, 2016), hal tersebut dibuktikan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 1. Perbandingan Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan	Kemandirian (%)	Pola hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Adapun perhitungan perbandingan diatas dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{total pendapatan}} \times 100\%$$

- Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah. (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
- Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

## 2) Analisis Rasio Efektivitas PAD

Dimana tipe rasio ini menekankan pada kapabilitas pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan PAD yang berkaitan dengan target yang sebelumnya telah direncanakan dan ditetapkan. Tentunya target ini atas dasar pertimbangan potensi dan kemampuan riil daerah tersebut. Penghitungan rasio efektivitas untuk PAD ini dilakukan dengan cara mengkomparasikan antara pendapatan PAD yang terealisasi dengan pendapatan PAD yang mencapai target (Mahmudi, 2016). Sebagaimana tabel rumus berikut ini:

$$\text{Rasio efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 2. Kriteria Efektivitas**

<b>Kriteria Efektivitas</b>	<b>Persentase Efektivitas</b>
<b>Sangat Efektif</b>	>100%
<b>Efektif</b>	100%
<b>Cukup Efektif</b>	90-99%
<b>Kurang Efektif</b>	75-89%
<b>Tidak Efektif</b>	<75%

3) Analisis Rasio keserasian

Rasio keserasian yang membahas mengenai belanja operasi, dimana rasio ini merupakan perbandingan dari total biaya operasional dan pengeluaran daerah. Hubungan ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada setiap pengguna atau pihak yang berkepentingan mengenai laporan tentang bagian-bagian pengeluaran daerah yang didistribusikan untuk pengeluaran operasional. Belanja operasional sendiri merupakan jenis belanja yang kebermanfaatannya dirasakan dalam kurun waktu satu tahun keuangan. Sehingga hal tersebut bersifat jangka pendek dan pada beberapa kasus dapat berjalan secara kontinu dan konsisten.

Rasio Belanja modal sendiri merupakan komparasi antara jumlah keseluruhan belanja modal yang terealisasi dengan jumlah keseluruhan belanja daerah. Berdasarkan pada tipe rasio ini, setiap pengguna laporan dapat melihat dengan jelas bagian dari pengeluaran daerah yang diperuntukkan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di Negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif-kualitatif sesuai untuk penelitian yang akan dilakukan ini, di mana peneliti berusaha untuk mendeskripsikan hasil analisis rasio keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten wonosobo. Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan sampling purposive yang bertujuan untuk mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu dan memenuhi kriteria tertentu. Sampel dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Wonosobo berupa laporan realisasi anggaran tahun 2017-2019.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka, buku, internet, jurnal yang dapat membantu melangkapi kajian proses penelitian. Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kinerja keuangan pemerintah Wonosobo pada Analisis Rasio kemandirian keuangan daerah pada rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{total pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian 2018} = \frac{239.067.708.184,10}{1.142.565.836.738,00} \times 100\% = 20,92\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian 2019} = \frac{232.794.106.006,53}{1.242.986.067.730,00} \times 100\% = 18,72\%$$

**Tabel 3. Rasio Kemandirian keuangan Daerah**

Tahun	PAD Wonosobo	Bantuan Dari pusat dan provinsi	Persentase	Nilai
2018	239.067.708.184,10	1.142.565.836.738,00	20,92%	Rendah Sekali
2019	232.794.106.006,53	1.242.986.067.730,00	18,72%	Rendah Sekali

Sumber : LO kab. Wonosobo

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Kemandirian PAD Kabupaten Wonosobo menunjukkan bahwa kemandirian Kabupaten Wonosobo masih instruktif yang berarti masih bergantung kepada bantuan dari pusat dan provinsi. Dalam dua tahun berturut-turut, PAD dan bantuan dari pusat mengalami penurunan yaitu pada tahun 2018-2019. Bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi yang relatif besar menjadi sebuah permasalahan tersendiri untuk kemandirian Kabupaten Subang. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebesar Rp 1.142.565.836.738,00 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 bantuan mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.242.986.067.730,00 . hal ini menjadikan kabupaten wonosobo berada pada titik rendah yaitu sebesar 20,92% pada tahun 2018 dan sebesar 18,72% pada tahun 2019. Jadi, kinerja keuangan Kabupaten Wonosobo berdasarkan rasio kemandirian daerah secara keseluruhan berada pada posisi rendah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi masih tinggi.

## 2. Analisis Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektivitas Pendapatan}_{2018} = \frac{226.819.478.601,00}{212.079.482.339,00} \times 100\% = 106,95\%$$

$$\text{Rasio efektivitas Pendapatan}_{2019} = \frac{238.371.743.591,00}{227.435.357.864,00} \times 100\% = 104,80\%$$

**Tabel 4. Analisis rasio efektivitas**

Tahun	Target	Realisasi PAD	Persentase	Nilai
2018	212,079,482,339,00	226,819,478,601,00	106,95%	Sangat Efektif
2019	227.435.357.864,00	238.371.743.591,00	104,80%	Sangat Efektif

Berdasarkan hasil perhitungan pada rasio efektifitas PAD pemerintah Kabupaten Magelang dari tahun 2018-2019 telah dikatakan sangat efektif karena pada dasarnya nilai rasio persentase efektivitas melebihi 100 %. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya nilai rasio dapat dimaksimalkan dalam upaya meningkatkan PAD. Selain itu adanya evaluasi yang berdampak untuk tahun berikutnya sehingga menjadi lebih baik lagi.

### 3. Analisis Rasio Kecerassian

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi 2017} = \frac{1,270,400,013,646.00}{1,427,840,983,198.00} \times 100\% = 88,9\%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi 2018} = \frac{1,189,977,228,265.00}{1,576,536,848,054.00} \times 100\% = 75,48\%$$

Tabel 5. Analisis rasio keserasian

Tahun	Realisasi Total Belanja Operasi	Total Belanja	Persentase	Nilai
2017	1,270,400,013,646.00	1,427,840,983,198.00	88,9%	-
2018	1,189,977,228,265.00	1,576,536,848,054.00	75,48%	-

Pada tabel diatas, dapat dilihat persentase belanja operasi kabupaten Wonosobo selama dua tahun mengalami penurunan pada tahun 2014 persentase rasio belanja operasional sebesar 88,9% dan pada tahun 2018 persentase rasio belanja operasional menurun menjadi 75,48%. Untuk penilaian rasio belum ada kriterianya tentang rasio belanja operasional. Sebab kebutuhan belanja tiap daerah berbeda. maka kriteria penilaian tidak bisa menjadi acuan untuk mengukur tingkat keserasian daerah.

### KESIMPULAN

Hasil dari analisis rasio dengan menggunakan data laporan keuangan Kabupaten Wonosobo yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018-2019 jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerahnya masih dapat dikategorikan rendah sekali. Selain itu kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018-2019 jika dilihat berdasarkan rasio efektifitasnya dikategorikan sangat efektif. Selain itu, pada data analisis rasio keserasian belanja operasional pada tahun 2017-2018 dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Wonosobo memiliki kecenderungan menggunakan anggarannya untuk belanja operasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhajjriana, G. I., Nor, W., & Wijaya, R. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi internet financial reporting pemerintah daerah dan implikasinya terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 17(2), 100–109.
- Farida, A. S., & Nugraha, R. F. M. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(2), 107–124.
- Halim, A. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah (ed. 3) Koran*. Penerbit Salemba.
- Jasasila, J. (2017). Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Batang Hari 2012-2016. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 2(2), 175–182.
- Mahmudi, M. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Edisi Ketiga, UPP STIM YKPN, Yogyakarta*.
- Mahsun, M. (2006). Pengukuran kinerja sektor publik. *Yogyakarta: BPFE*.
- Ningtyas, P. E., & Widayawati, D. (2015). Pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(1).
- Nurchayati, N. (2021). Belanja Modal APBD KABUPATEN-KOTA Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017–2018. *Serat Acitya*, 2(1), 44.
- Pramono, J. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*, 7(1).
- Rosmawati, S., & Kartikasari, F. (2020). Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014-2019. *CITRA EKONOMI*, 1(2), 73–78.
- Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 110–120.
- Satria, D. I., & Munandar, M. (2017). Model Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Dalam APBD Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Visioner & Strategis*, 6(2).